PENGARUH SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

(Studi Kasus Pada Pegawai Instansi di BPKAD Kabupaten Karawang)

FITRIYANAH

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRAK

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu yang memberikan kemudahan serta efektif dan efisien organisasi perlu memanfaatkan dan mengembangkan suatu sistem informasi yang memungkinkan pengguna sistem informasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Sedangkan penerapan anggaran berbasis kinerja adalah pertanggungjawaban para pengambil keputusan. Kinerja pemerintah daerah adalah perbuatan,penampilan,prestasi yang dapat ditunjukan secara nyata dan dapat diukur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 66 pegawai instansi yang ada di BPKAD Karawang, dengan pengambilan sample menggunakan teknik *simple random sampling*. Data yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada 66 pegawai instansi. Teknis analisis data menggunakan SEM PLS dengan bantuan *software SmartPLS 2.0.*

Hasil dari penelitian ini SIPKD berpengaruh positif signifikan pada kinerja pemerintah daerah, dan penerapan anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh pada kinerja pemerintah daerah penelitian ini memberikan bukti empiris dimana SIPKD dan penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di BPKAD Karawang.

Kata Kunci : SIPKD, penerapan anggaran berbasis kinerja, kinerja pemerintah daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja pemerintah dalam lingkup kajian organisasi adalah secara makro, tujuan, dan cita-cita, dan harapan suatu organisasi yang diusahakan pencapaiannya dan perwujudannya melalui organisasi tersebut. Bahwa sekelompok orang yang memiliki kesetiaan kepentingan juga diusahakan pencapaiannya melalui organisasi, sedangkan pada tingkat individu, berbagai tujuan, keinginan, cita-cita, harapan, dan kebutuhannya hanya bisa tersalurkan, terpenuhi, dan terpuaskan dengan menggunakan jalur organisasional. Sementara itu pengertian kinerja itu sendiri menurut Wibowo (2007:7) “Berasal dari pengertian ‘*performance’* yang memberikan pengertian sebagai hasil kerja atau prestasi kerja.” Namun, sebenarnya Amstrong dan Baron menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Sejalan dengan pengertian kinerja di atas Mangkunegara (2007:67) menyatakan sebagai berikut: Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sementara itu Mustopadidjaja (2002:45) menjelaskan bahwa untuk organisasi pemerintahan, kinerja pemerintahan yang baik (*good government performance*) bukan saja memerlukan kebijakan yang baik *(good policy),* tetapi juga system dan proses pelaksanaan kebijakan yang baik *(good policy implementation system and process)* dan kedua hal terakhir itu memerlukan system administrasi pemerintahan negara yang baik *(good public administration system)* yang mensyaratkan adanya sumberdaya manusia yang baik dan diindahkannya prinsip "*the right men and women and the right places".* Kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan kinerja yang baik apabila system dan proses pelaksanaannya tidak baik,seperti terjadinya keterlambatan penyerapan anggaran di pusat maupun di daerah dan kesemuanya itu juga tergantung pada kompetensi sumberdaya manusianya yang berperan dalam system dan proses kebijakan (Ketua Tim Kunker Komisi XI DPR Marwan Cik Asan 2017). Menurut Mardiasmo (2006:45) Penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia dimaksudkan untuk menjawab tuntutan demokratisasi yang mengedepankan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam bidang pemerintahan dan politik, khususnya bidang pengelolaan keuangan negara. Sri Mulyani mengatakan tantangan menteri keuangan ke depan cukup berat, masih banyak permasalahan dalam pegelolaan keuangan antara lain adalah penerapan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program yang dilaksanakan. (Sri Mulyani Mentri Keuangan 2016) Menurut Amir Abadi Jusuf (2000:4) Istilah sistem informasi menganjurkan penggunaan teknologi komputer di dalam organisasi untuk menyajikan informasi kepada pemakai. Sistem informasi berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang meliputi proses penganggaran, perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan keluarga, pengelolaan keuangan perusahaan dan instansi “Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban” (Syarifudin 2005:89). Terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pegelolaan keuangan yang berpengaruh terhadap penyempuraan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) yang terintegrasi dengan sistem informasi lainya. (Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat 2017).

Berdasarkan uraian fenomena di atas, penelitian ini menggunakan Pegawai di BPKAD Kabupaten Karawang sebagai obyek penelitian karena pekerjaan sebagai pegawai instansi dengan penggunaan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah pada instansi. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian mengenai **“Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Seberapa besar pengaruh Penerapan anggaran berbasis kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Hamidi (2007:6) Penelitian merupakan aktivitas keilmuan yang dilakukan karena ada kegunaan yang ingin dicapai, baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia maupun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maksud penelitian ini adalah untuk mencapai kinerja pemerintah yang baik atas pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Derah.

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Instansi
   Hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu alat informasi dan bahan pertimbangan kepala bagian instansi terkait dalam hal kinerja pemerintah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu
   Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi khususnya materi Akuntansi Sektor Publik, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan tambahan informasi yang lebih luas mengenai kinerja pemerintah daerah yang mempengaruhinya dan teori yang berkaitan tentang pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah dan Penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Menurut Amir Abadi Jusuf (2000:4) Istilah sistem informasi menganjurkan penggunaan teknologi komputer di dalam organisasi untuk menyajikan informasi kepada pemakai. Sistem informasi berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat.

2.1.1.1 Indikator Sistem Informasi

Menurut Menurut Jogianto (2007) Sistem informasi meliputi:

1. Kemudahan Penggunaan (*perceived ease of use*)
2. Kemanfaatan (*perceived usefulness)*

2.1.1 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Mardiasmo (2006:45) Penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia dimaksudkan untuk menjawab tuntutan demokratisasi yang mengedepankan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam bidang pemerintahan dan politik, khususnya bidang pengelolaan keuangan negara.

2.1.2.1 Indikator Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Baridwan (2005:45) pengelolaan keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas
2. *Value for money*
3. Transparansi

2.1.2 Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Wibowo (2007:7) "Berasal dari pengertian *'performance'* yang berarti sebagai hasil kerja atau prestasi kerja." Namun, sebenarnya Amstrong dan Baron menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

2.1.3.1 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:125) Indikator kinerja Pemerintah Daerah terdapat beberapa jenis yaitu:

1. Kualitas
2. Kepuasan

2.2 Kerangka Pemikiran

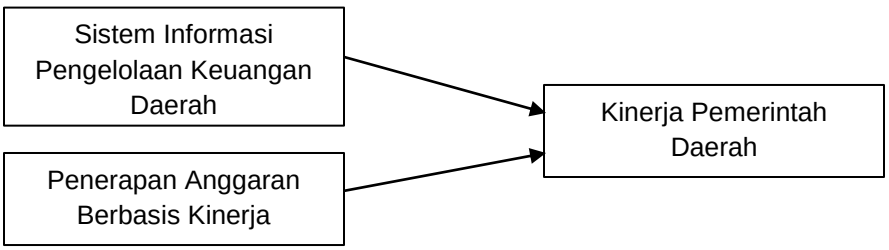
2.2.1 Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Amir Abadi Jusuf (2007:11) Sistem informasi tempat di mana para manajer mempengaruhi kebijakan,anggaran dan perencanaan dan pelayanan informasi yang terdiri dari anggota-anggota dalam sistem informasi.

2.2.2 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Antoro (2006: 45) Anggaran merupakan rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode dimasa yang akan datang Penyusunan anggaran berdasarkan suatu struktur dan klasifikasi tertentu adalah langkah penting untuk memperoleh sistem penganggaran yang baik dan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara, sebagai alat pengawasan bagi masyararakat terhadap kebijakan dan kemampuan pemerintah. Sistem anggaran berbasis kinerja dipandang tepat untuk memenuhi tujuan tersebut. Anggaran berbasis kinerja menghubungkan antara pengeluaran (belanja) dengan hasil yang diinginkan sehingga pengeluaran tersebut dapat diprioritaskan dan unit kerja pemerintah dapat bertanggung jawab terhadap hasil pencapaiannya.

Berdasarkan kerangka Pemikiran tersebut, maka penulis dapat menggambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:110) Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan hasil uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H_0 :Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Derah

H_a :Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Rosady Ruslan (2003:24) Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Menurut Sugiyono (2005:21) menerangkan penelitian Deskriptif adalah ”Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.” Menurut Suharsimi Arikunto (2010:8), penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2003:32) mengemukakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis,indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Bebas/ Variabel Independen (X_1 dan X_2)
   Menurut Sugiyono (2003 :32) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen (terikat) yang menjadi variabel indenpenden atau variabel bebas, pada penelitian ini adalah Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X2) yaitu Sistem informasi Pengelolaan keuangan daerah dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Derah.
2. Variabel Terikat/ Variabel Dependen (Y)
   Menurut Sugiyono (2003 : 32) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
   Variabel dependen dalam penelitian ini variabel Y adalah Kineja Pemerintah Daerah.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner:
   a. Angket atau Kuesioner
      Menurut Kusumah (2011:78) definisi kuesioner adalah sebagai berikut :

"Daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada subjek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti.Kuesioner ada dua macam yaitu kuesioner berstruktur atau bentuk tertutup dan kuesioner tidak terstruktur atau terbuka.Kuesioner tertutup berisi pertanyaan yang disertai pilihan jawaban, kuesioner terbuka berisi pertanyaan yang tidak disertai dengan jawaban".

b. Wawancara

Menurut Setyadin dalam Gunawan (2013:160) definisi wawancara adalah sebagai berikut :

Suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik".

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) definisi dokumen adalah sebagai berikut:

"Catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan,kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif".

d. Observasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:199) definisi observasi adalah sebagai berikut :

"Observasi yang disebut juga pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra".

3.4 Penarikan Sampel

Untuk membuktikan kebenaran jawaban yang masih sementara (hipotesis), maka peneliti melakukan pengumpulan data pada obyek tertentu.Karena obyek sebagai populasi terlalu luas, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Menurut Arikunto (2013:174) definisi sampel adalah sebagai berikut :

"Sebagian atau wakil populasi yang diteliti".

Menurut Sutrisno Hadi dalam Narbuko dan Achmadi (2013:107) definisi sampel atau contoh adalah sebagai berikut :

"Sebagian obyek atau subyek yang diselidiki dari keseluruhan obyek atau subyek penelitian. Selain itu, sampel juga merupakan bagian dari populasi yang benar-benar mewakili dari permasalahan yang akan diteliti".

Berdasarkan dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa slovin adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan sebagian anggota populasi. Oleh karena itu peneliti mengambil jumlah sampel 66 pegawai instansi dengan populasi 80 pegawai instansi di BPKAD Kabupaten Karawang.

3.5 Metode Pengujian Data

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1. Analisis Data Deskriptif

   Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian deskriptif ini dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan dengan cara menyebarkan kuisioner dan selanjutnya diolah menjadi data lalu dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

2. Analisis Data Verifikatif

   Analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan *software Smart PLS* 2.0. Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur

berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

Menurut Imam Ghozali (2006:18), *Partial Least Square* (PLS) merupakan metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. Tujuan *Partial Least Square* (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan penguraian serta menganalisis data yang diperoleh mengenai sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.1.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Hasil Pengujian Validitas

Pengujian validitas ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu alat ukur dinyatakan valid atau sah apabila memiliki nilai koefisien validitas > 0,30. Dengan menggunakan *software* SPSS 16.0,.

2. Hasil Pengujian Reliabilitas

Selain valid, Pengujian reliabilitas ini dimaksudkan untuk menguji keandalan dari suatu alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji keandalan dari alat ukur digunakan tehnik belah dua atau sering disebut *Split Half*. Dengan menggunakan *software* SPSS 16.0,.

Berdasarkan Nilai koefisien reliabilitas untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang sudah tepat, dapat dipercaya (reliabel) atau andal.

4.1.2 Analisis Deskriptif Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1)

Tanggapan responden mengenai sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dari 2 indikator dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden yang digunakan untuk mengukur variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Kemudahan Pengguna (*Perceived Ease Of Use*)	**427**	**660**	**64,70%**	**Cukup Baik**
2	Kemanfaatan (*Perceived Usefulness*)	**456**	**660**	**69,09%**	**Baik**
	Total	**883**	**1320**	**66,89%**	**Cukup Baik**

Sumber: Data olah hasil kuisioner, 2017

Perhitungan: Skor Ideal = Nilai Tertinggi x Jumlah Responden

Tabel diatas merupakan rekapitulasi jawaban responden pada variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang diukur menggunakan dua indikator dan 4 item pernyataan.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat pada variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 66,89%.

4.1.3 Analisis Deskriptif Penerapan Angggaran Berbasis Kinerja (X_2)

Tanggapan responden mengenai Penerapan Angggaran Berbasis Kinerja dari 2 indikator dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden yang digunakan untuk mengukur variabel Penerapan Angggaran Berbasis Kinerja dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Penerapan Angggaran Berbasis Kinerja

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Akuntabilitas	**438**	**660**	**66,36%**	**Cukup Baik**
2	Transparansi	**439**	**660**	**66,52%**	**Cukup Baik**
	Total	**877**	**1320**	**66,44%**	**Cukup Baik**

Sumber: Data olah hasil kuisioner, 2017
Perhitungan: Skor Ideal = Nilai Tertinggi x Jumlah Responden

Tabel diatas merupakan rekapitulasi jawaban responden pada variabel Penerapan Angggaran Berbasis Kinerja yang diukur menggunakan dua indikator dan 4 item pernyataan. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat pada variabel Penerapan Angggaran Berbasis Kinerja sebesar 66,44%.

4.1.4 Analisis Deskriptif Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Tanggapan responden mengenai Kinerja Pemerintah Daerah dari 2 indikator dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden yang digunakan untuk mengukur variabel Kinerja Pemerintah Daerah dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Kualitas	**436**	**660**	**66,06%**	**Cukup Baik**
2	Kepuasan	**439**	**660**	**66,52%**	**Cukup Baik**
	Total	**875**	**1320**	**66,29%**	**Cukup Baik**

Sumber: Data olah hasil kuisioner, 2017
Perhitungan: Skor Ideal = Nilai Tertinggi x Jumlah Responden

Tabel diatas merupakan rekapitulasi jawaban responden pada variabel Kinerja Pemerintah Daerah yang diukur menggunakan dua indikator dan 4 item pernyataan. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat pada variabel Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 66,29%.

4.1.5 Hasil Analisis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software *SmartPLS 2.0* maka hasil analisis verifikatif Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0,501 dan termasuk dalam kategori hubungan yang sedang berada pada interval korelasi antara cukup baik Artinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Nilai koefisien determinasi (parsial) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) memberikan pengaruh sebesar 0,501% terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) dan termasuk ke dalam kriteria pengaruh yang cukup baik Sedangkan selisihnya sebesar 0,711% merupakan faktor lain yang tidak diteliti.

4.1.6 Hasil Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software *SmartPLS 2.0* maka hasil analisis verifikatif Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X_2) dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0,404 dan termasuk dalam kategori hubungan yang kuat berada pada interval korelasi antara cukup baik Artinya Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Nilai koefisien determinasi (parsial) Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) memberikan pengaruh sebesar 0,404% terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) dan termasuk ke dalam kriteria pengaruh yang cukup baik Sedangkan selisihnya sebesar 0,711% merupakan faktor lain yang tidak diteliti.

4.1.7 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_1 diperoleh sebesar 4,347. Nilai tersebut lebih besar dari t_{kritis} 2,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima $H_{a,}$ artinya bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terbukti berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Karawang dengan kontribusi pengaruh sebesar 40%.

2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 3,389. Nilai tersebut lebih besar dari 2,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima $H_{a,}$ artinya bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terbukti berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada petugas pegawai instansi pada BPKAD Kabupaten Karawang dengan kontribusi pengaruh sebesar 31,1%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

4.2.2 Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 6,619 lebih besar dari t_{tabel} yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Karawang.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa ada masalah di Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan

kinerja yang baik apabila sistem dan proses pelaksanaannya tidak baik, seperti terjadinya keterlambatan penyerapan anggaran di pusat maupun di daerah dan kesemuanya itu juga tergantung pada kompetensi sumberdaya manusianya yang berperan dalam system dan proses kebijakan (Ketua Tim Kunker Komisi XI DPR Marwan Cik Asan 2017).

.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 66,36% dan termasuk cukup baik yang artinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah belum baik. Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan melalui indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator akuntabilitas sebesar 66,52%, terdapat *gap* sebesar 33,64%, hal itu menandakan masih adanya masalah pada transparansi.

4.2.3 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

4.2.4 Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,389 lebih besar dari t_{tabel} yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 2 signifikan. Artinya Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Karawang.

Fenomena yang terjadi dilapangan masih ada masalah di Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, yaitu Sri Mulyani mengatakan tantangan menteri keuangan ke depan cukup berat, masih banyak permasalahan dalam pegelolaan keuangan antara lain adalah penerapan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program yang dilaksanakan. (Sri Mulyani Mentri Keuangan 2016).

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 66,44% dan termasuk cukup baik yang artinya Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja belum baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah transparansi dengan persentase sebesar 66,52%, terdapat gap sebesar 33,64%, hal itu menandakan masih adanya masalah pada indikator transparansi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil fenomena pada latar belakang penelitian, rumusan masalah, hipotesis dan hasil penelitian mengenai pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Karawang, maka peneliti menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berkorelasi pada kinerja pemerintah daerah pada BPKAD Kabupaten Karawang. Dengan kategori korelasi kuat, maka semakin baik sistem informasi pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Namun masih terdapat *gap*, hal tersebut menandakan masih adanya kekurangan atau kelemahan pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
2. Penerapan anggaran berbasis kinerja berkorelasi terhadap kinerja pemerintah daerah pada BPKAD Kabupaten Karawang. Dengan kategori korelasi kuat, maka semakin tinggi penerapan anggaran berbasis kinerja maka akan semakin tinggi pula kualitas kinerja pemerintah daerah. Pada penelitian ini penerapan anggaran berbasis kinerja yang terjadi pada BPKAD Kabupaten Karawang berada dalam kriteria cukup baik, hal tersebut menandakan masih adanya kekurangan atau kelemahan pada penerapan anggaran berbasis kinerja.

5.2 Saran

Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Karawang, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Diharapkan sebaiknya BPKAD Kabupaten Karawang perlu melakukan peningkatan kemudahan pengguna dengan cara penyederhanaan sistem yang ada,karna aplikasi didalamnya masih terlalu rumit. Kemudian diiringi dengan peningkatan kemampuan pengguna dengan cara diadakannya pelatihan bagi para pegawai mengenai SIPKD agar lebih digunakan,serta dalam penerapan anggaran perlu melakukan peningkatan dalam pengolahan data keuangan karena anggaran yang sudah ada tetapi tidak sesuai dengan hasil maka BPKAD Kabupaten Karawang perlu melakukan peningkatan dalam pengolahan data sehingga hasilnyapun akan sama dengan apa yang telah dianggarkan,dan kinerja pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan ketepatan waktu dalam proses pelaksanaannya sehingga tidak terjadi keterlambatan anggaran di BPKAD Kabupaten Karawang.
2. Diharapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah semakin baik, sebaiknya pegawai pada BPKAD Kabupaten Karawang menanyakan perihal transparansi akses untuk memperoleh dokumen tentang penggunaan anggaran agar mudah diperoleh dan hal lainnya adalah pegawai mampu mempertanggung jawabkan pengelolaan anggaran yang terealisasi. Hal tersebut diperlukan agar kinerja pemerintah daerah lebih baik lagi.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah, serta sebagai masukan dan tambahan referensi ilmu akuntansi bagi para pembaca.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
   Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik AkuntansiKeuangan Daerah.*Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Halim dan Theresia.2007. *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi kedua.*Yogyakarta : upp stim ykpn.

Amir Abadi Jusuf.2007.*Sistem Informasi Akuntansi.* Jakarta: Salemba empat

Abdul Rohman.2009. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 9 No. 1:21-32.16 Februari 2011.

Almanda Primadona.2013. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.*

Abdul Halim.2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta

Ahmad yani.2013.*Akuntansi pemerintahan*.jakarta.salemba empat

Abdul Aziz.2016. *pengaruh evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat aceh di. jurnal ekonomi dan bisnis volume* 16 issn 1693-8852

Baridwan.2005. *Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan Penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap Akuntabilitas publik*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. ISSN 2460-0784

Chabib Soleh. 2009 .*Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah* Bandung: Fokus Media.

Deddi Noerdiawan.2012. *Akuntansi Pemerintahan.*Jakarta: Salemba empat

Deddi Noerdiawan.2006.*Akuntansi Sektor Publik.*Jakarta: Salemba empat

Dominggus Pirade.2013. *pengaruh penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sipkd terhadap kinerja pegawai di kabupaten tana toraja.* Jurnal Analisi. vol. 2 no. 2 : 183 – 192 issn 2303-100x

Hanif Al Fatta. 2007. *Analisis dan perancangan sistem informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan dan organisasi modern*, Yogyakarta: Andi

Indra Bastian.2003.*Sistem Akuntansi Sektor Publik.*Jakarta: Salemba empat.

Imam Ghazali.2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi3*.Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Irvan Saefulloh .2013. *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang.*

Irvan Saefulloh .2013. *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang.*

Jogiyanto.2007.*Sistem Informasi Keperilakuan edisi Revisi*.Yogyakarta:Andi.

Jogianto. 2005. *Sistem Teknologi Informasi*. Andi. Yogyakarta

Mustopadidjaja.2002. *Akuntansi pemerintahan.* Jakarta: Salemba empat

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2004.*Akuntansi Sektor Publik.*Jakarta: Salemba empat

Nazir M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Putra.2010. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Di Pemerintah Kabupaten Simalungun. Tesis*. Sekolah Pasca Sarjana USU.

Sugiono.2014.*metode penelitian kuantitatif,kualitatif danR&D.*Bandung:alfabeta

Rohman A. 2009. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja PemerintahDaerah*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.9 No. 1

Putra.2010. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Di Pemerintah Kabupaten Simalungun. Tesis*. Sekolah Pasca Sarjana USU.

Sedarmayanti.2003*.Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba empat

Thomas C Alewine. 2002. Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Kinera Performance (Ed) *Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja*, hal 244 –249 Jakarta PT. Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia

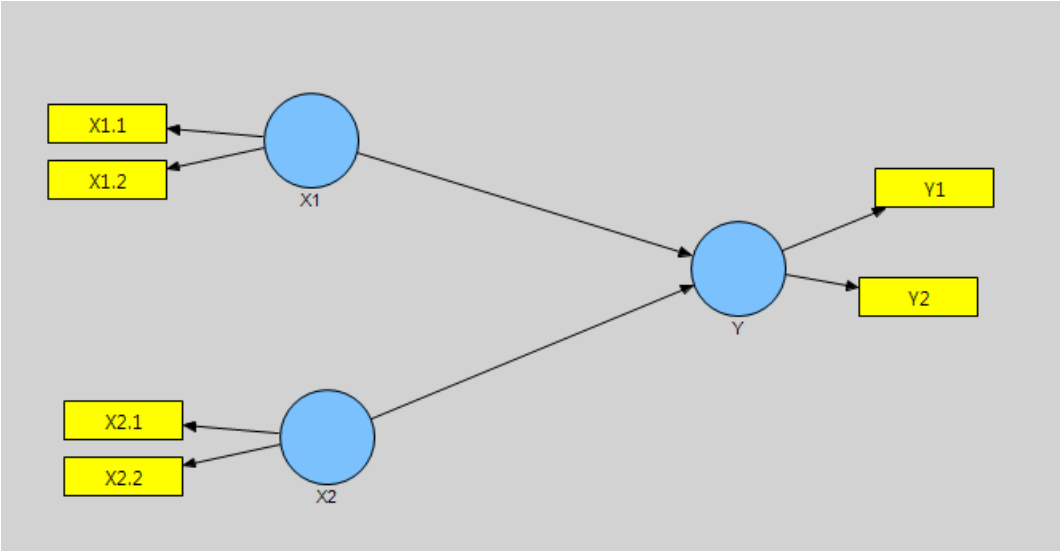
Tata Sutabri.2005. *Sistem Informasi Manajemen*.Yogyakarta: Andi

Yuliati. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapai*

Otonomi Daerah Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.

LAMPIRAN

Koefisien Jalur Struktural



Keterangan:
X_1 = Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
$X_{1.1}$ = Kemudahan Pengguna (*Perceived Ease Of Use*)
$X_{1.2}$ = Kemanfaatan (*Perceived Usefulness*)

X_2 = Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
$X_{2.1}$ = Akuntabilitas
$X_{2.2}$ = Transparansi

Y = Kinerja Pemerintah Daerah
Y_1 = Kualitas
Y_2 = Kepuasan

Tabel 4.31
Nilai Koefisien Jalur Struktural dan Uji Signifikansi Hipotesis
(*Path Coefficients*)

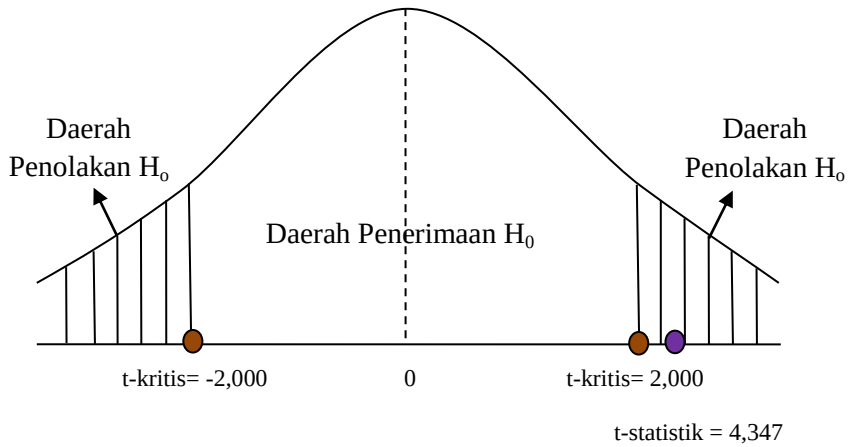
	***Original Sample* (O)**	**T *Statistics* (|O/STERR|)**
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) -> Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0,501	4,347
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X_2) -> Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0,404	3,389

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

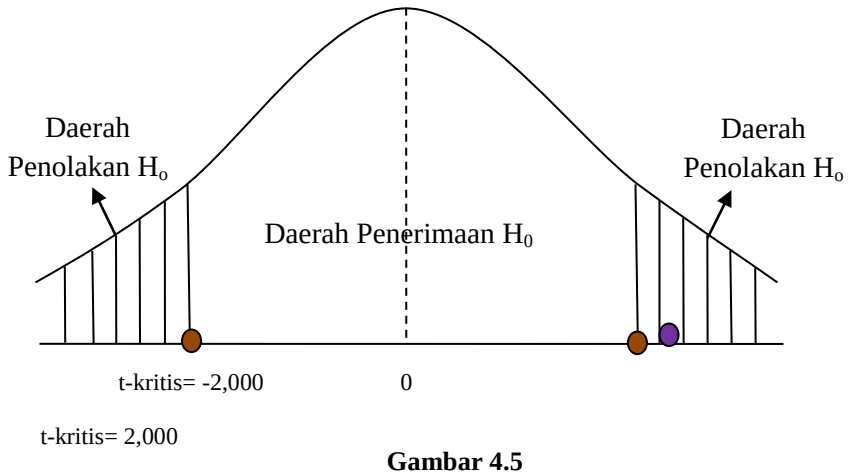
Tabel 4.32
Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

	Koefisien Jalur Struktural	Korelasi dengan Y	Pengaruh (%)
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) -> Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0,501	0,798	40%
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X_2) -> Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0,404	0,772	31,1%
TOTAL PENGARUH (R^2)			71,1%

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS



Gambar 4.4
Kurva Uji Hipotesis Variabel X_1 terhadap Y



Gambar 4.5
Kurva Uji Hipotesis Variabel X_2 terhadap Y